



KEMENPKP

RENCANA AKSI KINERJA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI I

TA. 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta kuasa-Nya sehingga Dokumen Rencana Aksi (T0) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Aksi ini merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I memiliki tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitas serah terima aset. Dalam melakukan tugasnya tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki fungsi Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan,

Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan, Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman, Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian, Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan, Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan, Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan Kawasan permukiman, Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan,

Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset, Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, Pembangunan zona integritas, system pengendalian intern, sistem manajemen risiko serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan dan Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memuat rencana pelaksanaan pekerjaan bulanan selama kurun waktu 5 (lima) bulan. Rencana tersebut digunakan sebagai dievaluasi pencapaian target per bulan untuk menjadi ukuran kinerja dalam bentuk laporan pengukuran kinerja bulanan. Dengan adanya Rencana Aksi ini diharapkan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Manado, Agustus 2025

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sulawesi I,



H. H. Hujura, S.T., M.T.
NIP. 196811251999031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
B.1 Subbagian Umum dan Tata Usaha	3
B.2 Seksi Pelaksanaan Wilayah I	3
B.3 Seksi Pelaksanaan Wilayah II	4
B.4 Kepala Satuan Kerja (Kasatker)	4
B.5 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	4
B.6 Bendahara	5
BAB II	10
PENETAPAN KINERJA	10
2.1. TARGET DAN CAPAIAN KINERJA	10
2.1.1. Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan	11
2.2 Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I	13
BAB III	16
PENUTUP	16

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Sekretariat Jenderal.....</i>	8
Tabel 1.2 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	8
Tabel 1.3 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	8
Tabel 1. 4 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	9
Tabel 1.5 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	9
 Tabel 2.1 : Amanat DIPA Berdasarkan DIPA Awal Tahun Anggaran 2025	10
Tabel 2.2 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kerja (PK) awal 2025 Sekretariat Jenderal	11
Tabel 2.3 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025 Direktorat jendral Kawasan Permukiman.....	11
Tabel 2. 4 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Perdesaan.	12
Tabel 2. 5 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Perkotaan	12
Tabel 2. 6 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	13
Tabel 2. 7 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Sekretariat Jenderal.....	13
Tabel 2. 8 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Kawasan Permukiman.....	13
Tabel 2.9 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan.....	14
Tabel 2. 10 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan.....	15
Tabel 2. 11 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Tata Kelola.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai P3KP Sulawesi I.....	6
---	---

The page features decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-left corners contain triangles in dark blue, gold, and white, with some triangles having horizontal stripes. The top-right and bottom-right corners contain triangles in dark blue, gold, and white, with some triangles having horizontal stripes. The central text is in a bold, dark blue, sans-serif font.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yang sebelumnya adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman, saat ini merupakan unit organisasi dibawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tiga wilayah cakupan kerja yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo yang dalam pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.

Rencana Aksi Unit Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I merupakan penjabaran secara periodik atas sasaran dan target yang tertuang dalam Perjanjian kinerja (PK). Rencana Aksi ini akan menjadi acuan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja secara berkala, yaitu pada tiap bulan dalam 1 (satu) tahun. Untuk memberikan gambaran perencanaan dan kinerja yang akan diukur, maka akan diuraikan terlebih dahulu tugas dan fungsi serta struktur organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I sesuai Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan; Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan Kawasan permukiman;
- Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- Pelaksanaan fasilitasi serah terima asset;
- Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, Pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan

- Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

Tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I ini kemudian diturunkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing subbagian dan seksi yang terdapat di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Berikut merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing subbagian dan seksi tersebut:

B.1 Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan Pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan system pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi public serta layanan hukum balai. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Subbagian Umum dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program dan anggaran
- Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian
- Pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan
- Pengelolaan data dan informasi
- Fasilitasi serah terima aset
- Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- Koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai

B.2 Seksi Pelaksanaan Wilayah I

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas :

- Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; serta

- Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitas penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

B.3 Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas :

- melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

B.4 Kepala Satuan Kerja (Kasatker)

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I memiliki 4 Satuan Kerja yaitu Satuan Kerja Balai P3KP Sulawesi I, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Kasatker bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

B.5 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas dan fungsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Kerja BP3KP Sulawesi I dan Satuan Kerja PKP Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo, memiliki PPK yang menyelenggarakan fungsi:

- Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- Pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
- Pengendalian pelaksanaan perjanjian/kontrak
- Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
- Penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya dengan Berita Acara Penyerahan kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I untuk diteruskan kepada Menteri PKP

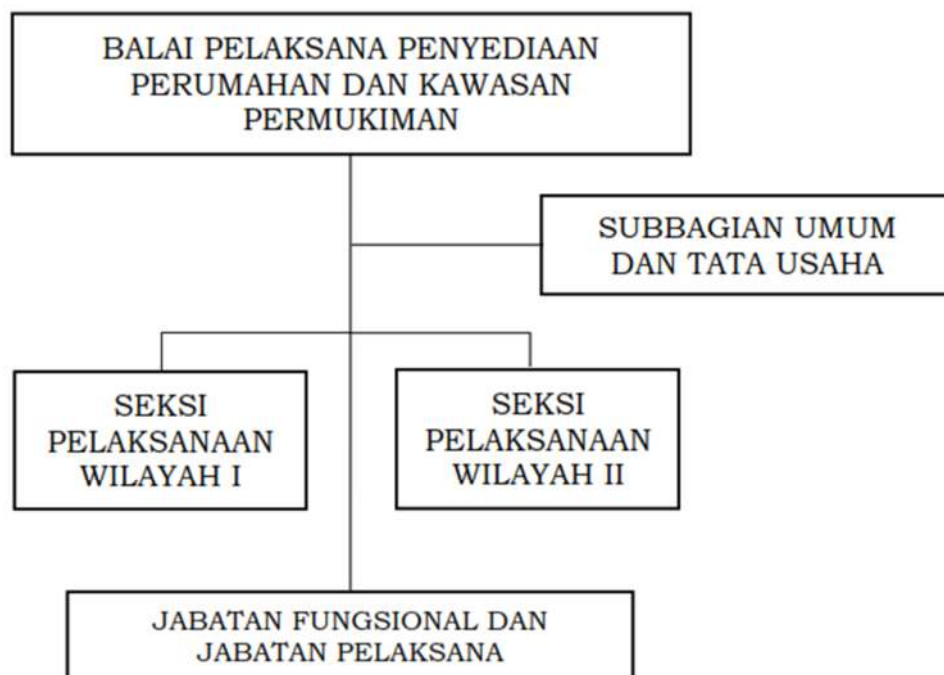
B.6 Bendahara

Balai P3KP memiliki 4 Bendahara yang masing-masing berkedudukan di Satker BP3KP Sulawesi I dan Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo. Bendahara melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bendahara menyelenggarakan fungsi:

- Pengelolaan dan pembukuan uang/surat berharga
- Pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
- Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih
- Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak
- Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran
- pengeluaran (akun 6 digit)

- Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN

Pengelolaan sumber daya manusia, menjadi fondasi penting dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, sumber daya manusia yang terkelola dengan profesional dan responsif akan melahirkan aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi dan sigap dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan ke depan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai P3KP Sulawesi I

Sesuai dengan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian PKP diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta pengukuran kinerja per triwulan dan tahunan. Adapun Sistem Kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui Upaya merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja

secara berkesinambungan guna mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I berupaya secara terus – menerus menerapkan prinsip – prinsip perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kerja yang berisikan perjanjian antara Pihak yang diberikan tanggung jawab (dalam hal ini Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I) dengan Pihak Pimpinan yang memberikan tanggung jawab dalam hal ini 5 unit organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Kawasan permukiman, Direktorat Perdesaan, Direktorat Perkotaan, dan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I selama satu tahun kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Dokumen Penetapan Kinerja disusun setelah terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini dimaksudkan agar Dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan dana. Dokumen Penetapan (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam Pengukuran Kinerja suatu unit organisasi. Terdapat 2 program dalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yaitu: 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 2) Program Dukungan Manajemen.

Tabel 1.1 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Sekretariat Jenderal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	4 Layanan

Tabel 1.2 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknisk Penyelenggaraan Klinik Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman	1	Jumlah Lpaoran Pematuan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas Dan Penangan Kumuh	4 Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Di Kawasan Permukiman	1.008 Unit
3	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitas Penyiapan Lahan Dan Pemenuhan Rumah Yang Terlayani Psu Kawasan Permukiman	1	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan Dan Kawasan	430 Unit
4	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	1	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,81 Hektar

Tabel 1.3 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perdesaan	1	Jumlah Unit Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	336 Unit

Tabel 1. 4 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2.	Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan
2.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan Di Wilayah Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	334 Unit

Tabel 1.5 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Efektif Dan Akuntabel	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi Dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2.	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko Dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko Dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

The page features decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-left corners contain triangles in dark blue, gold, and white, with some triangles having horizontal stripes. The top-right and bottom-right corners contain triangles in dark blue and white, with some triangles having horizontal stripes. The central text is in a bold, dark blue, sans-serif font.

BAB II

PENETAPAN

KINERJA

BAB II PENETAPAN KINERJA

2.1. TARGET DAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I mempunyai tugas yaitu mendukung Pencapaian Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk itu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I mendukung 2 (dua) program yang melekat yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan melalui 4 Satker yaitu:

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
2. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara;
3. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
4. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan DIPA Awal TA. 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki amanat menjalankan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen dengan detail pagu anggaran tiap unit organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Amanat DIPA Berdasarkan DIPA Awal Tahun Anggaran 2025

No	Unit Organisasi	DIPA Awal				Jumlah
		Satker Balai	Satker PKP Prov. Sulut	Satker PKP Prov. Malut	Satker PKP Prov. Gorontalo	
1	Sekretariat Jenderal	755.170.000	1.029.771.000	561.036.000	596.130.000	2.942.130.000
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	610.426.000	15.488.099.000	15.995.002.000	14.436.535.000	47.529.062.000
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	314.556.000	140.114.138.000	16.069.470.000	117.432.000	156.615.596.000
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.181.222.000	1.841.886.000	8.361.148.000	508.065.000	11.892.312.000
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466.000	-	-	-	303.466.000

2.1.1.Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I bertanggung jawab terhadap Perjanjian Kinerja (PK) pada 5 (lima) unit Organisasi diantaranya Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Diektorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Sulawesi I, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa Balai Pelaksana Penyediaan bersama dengan Satuan Kerja memiliki tanggungjawab yang terus menerus (*in line*) dalam mencapai target Kementerian PKP.

Tabel 2.2 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kerja (PK) awal 2025
Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	1	1	1	1

Tabel 2.3 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025
Direktorat jendral Kawasan Permukiman.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelpaoran Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	-	-	-
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman	Jumlah Lpaoran Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Rususn, Peningkatan Kualitas Dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	1	1
		Junlah Rumah Swadaya Di Kawasan Permukiman	Unit	-	695	393	-
3.	Meningkatnya Perencaan, Fasilitas Penyiapan Lahan Dan Pemenuhan Rumah	Jumlah Pembangunan Psu Perumahan Dan Kawasan	Unit	-	-	-	430

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
	Yang Terlayani PSU Kawasan Permukiman						
4.	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	-	-	-	18,81

Tabel 2. 4 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025
Direktorat Jenderal Kawasan Perdesaan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-
		Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	-	1	1	-
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perdesaan	Jumlah Unit Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	-	287	49	-

Tabel 2. 5 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025
Direktorat Jenderal Kawasan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
		Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	1	1
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan Di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
		Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	-	53	281	-

Tabel 2. 6 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
1	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Efektif Dan Akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi Dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko Dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko Dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-

2.2 Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I

Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I mengacu pada target Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan penjabaran dari target kinerja beberapa unit organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Tabel 2. 7 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Per Triwulan (%)				
			Target PK	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	4 Layanan	-	-	100	-

Tabel 2. 8 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Kawasan Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Per Triwulan (%)				
			Target PK	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelpaoran Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan	1 Laporan			-	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Per Triwulan (%)				
			Target PK	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Penyediaan Rumah Layak Huni	Permukiman Dan Akuntabilitas Kinerja					
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan			-	100
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Rususn, Peningkatan Kualitas Dan Penanganan Kumuh	4 Laporan			-	100
		Jumlah Rumah Swadaya Di Kawasan Permukiman	1.008 Unit			504	1.008
3.	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitas Penyiapan Lahan Dan Pemenuhan Rumah Yang Terlayani PSU Kawasan Permukiman	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan Dan Kawasan	430 Unit			215	430
4.	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,81 Hektar			-	100

Tabel 2.9 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Per Triwulan (%)				
			Target PK	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan			-	100
		Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan			-	100
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perdesaan	Jumlah Unit Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	336 Unit			-	100

Tabel 2. 10 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target Capaian Per Triwulan (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan			-	100
		Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan			-	100
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan			-	100
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan Di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan			-	100
		Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	334 Unit			167	334

Tabel 2. 11 : Rencana Aksi Kinerja Balai P3KP Sulawesi I DIPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Target Capaian Per Triwulan (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Efektif Dan Akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi Dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan			-	100
2	Meningkatnya Dukungan Kebijakan Pengendalian Risiko Dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko Dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan			-	100

The page features decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-left corners contain triangles in dark blue, gold, and white, with some triangles filled with horizontal stripes. The top-right and bottom-right corners contain a pinwheel-like pattern of dark blue and white triangles, with some triangles filled with horizontal stripes. The central text is in a bold, dark blue, sans-serif font.

BAB III

PENUTUP

BAB III PENUTUP

Rencana aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I disusun berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam Perjanjian kinerja. Adapun rencana pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I secara umum mengikuti pola dan siklus kerja tahapan perencanaan program secara umum. Sasaran, target *outcome* dan *output* yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I perlu diacu dalam pelaksanaan kegiatannya melalui rencana aksi per-bulanan yang telah disusun ini.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut juga perlu adanya kerja keras dari seluruh jajaran baik staf maupun pimpinan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I untuk secara bersama-sama guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029. Dengan disusunnya Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I tahun 2025 ini maka seluruh jajaran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I agar dapat meningkatkan pengelolaan kinerjanya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan